

TEOLOGI EKONOMI KONTEKSTUAL SEBAGAI RESPON TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT SUKU AKIT DI PULAU RUPAT¹

PDT. SAMPE WARUWU

Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Abstraksi: There are contrast social phenomena being in Rupert Island i.e. (a) the phenomenon of the chronic poverty of Akit ethnic people; and (b) the phenomenon of the building of Rupert Island as an economic growth zona. Meanwhile, since 1969, HKBP, Christian Batak Protestant Church, had done Zending ministry in Rupert Island among Akit ethnic people, as known the indigeneous people. But, to face the acceleration of the change in Rupert Island, Church, as a community of the followers of Jesus Christ, had not given many attentions to the struggling of life of Akit ethnic people yet. Instead of serving the economic life of the poor people, Church had lived the paradigm of Zending milieu that Church services only the human needs of a spiritual life. By the very fact of chronic poverty and the heavy struggling of life of Akit ethnic people, Church was challenged to live her faith, to build her theology of contextual economy and to empower the poor people.

Kata-kata kunci: *Akit ethnic people, chronic poverty, economic growth zona, church, HKBP, theology of contextual economy, empowerment of the poor people.*

Seorang pendeta adalah pelayan *rohani*! Demikianlah identifikasi dari masyarakat, jemaat dan juga kalangan pendeta sendiri mengenai kependetaan. Dahulu, saya sendiri pun memahami demikian. Seorang pendeta di jemaat lokal bertanggung jawab melayani kebutuhan spiritual jemaat. Tugasnya berdoa, berkhotbah dan pengembalaan. Sementara kegiatan

ekonomi dan bisnis, dimana jemaat bergumul setiap hari dipahami bukanlah wilayah pelayanan pendeta. Semua kegiatan yang diklaim bersifat duniawi tidak pantas dimasuki oleh pendeta karena urusan pendeta hanya kegiatan yang bersifat surgawi. Pemahaman demikian sudah tidak relevan dan signifikan lagi!

Sekarang, saya memahami, pendeta sejatinya berpartisipasi aktif dalam upaya pembebasan atau pemerdekaan hidup manusia yang bergumul dalam urusan-urusan duniawi. Gereja bukanlah bangunan tempat jemaat datang dan berkumpul untuk berdoa, menyanyikan lagu pujian dan mendengarkan khotbah. Tetapi, gereja merupakan komunitas yang mengikuti gerakan Yesus Kristus dan yang menerima energi dan daya dari Allah oleh Roh Kudus untuk mentransformasi hidup baik jemaat maupun masyarakat kepada kondisi hidup yang berprikemanusiaan dan bermartabat. Sesungguhnya, ini bukanlah sesuatu yang baru. Jika hal-hal yang bersifat duniawi dipandang secara negatif sehingga dijauhi, sebaliknya, narasi-narasi Injil menegaskan, bahwa dunia ini telah menjadi arena pemberitaan dan kehadiran Kerajaan Allah. Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus justru telah berkarya di dunia ini hingga kini. Demikian pula hingga akhir zaman. Tidak ada penyelenggaraan pelayanan Kerajaan Surga tanpa terlibat aktif dalam pusran urusan-urusan duniawi. Oleh karena itu, gereja menjadi *alien* (asing) dan mati jika tidak peka terhadap konteks pergumulan manusia di sekitarnya dan tidak bergerak untuk mereduksi atau mengatasi pergumulan hidup itu.

Sehubungan dengan itu, saya membuat tulisan ini berangkat dari

kegelisahan teologis saya mengenai kehadiran gereja (baca: HKBP) di Pulau Rupa. Sebagai pimpinan pelayanan Zending HKBP di pulau ini, saya telah tinggal dan hidup bersama dengan jemaat dan masyarakat Suku Akit selama 4 tahun (2006-2010). Berbeda dengan jemaat di Gereja HKBP umumnya yang mayoritas adalah Suku Batak, justru jemaat yang dilayani Zending HKBP di Pulau Rupa adalah warga Suku Akit. Secara historis, pelayanan Zending dari HKBP di tengah-tengah masyarakat Suku Akit telah dimulai sejak April 1969. Dengan demikian, pelayanan ini telah berusia 41 tahun hingga tahun 2010. Ada 2 fenomena kehidupan sehari-hari yang berlangsung di Pulau Rupa ini, yakni: (a) Kemiskinan jemaat dan masyarakat Suku Akit; dan (b) Pembangunan Pulau Rupa menjadi zona pertumbuhan ekonomi.

1. Fenomena Kemiskinan Masyarakat Suku Akit

1.1 Masyarakat Suku Akit

Dari beberapa orang jemaat yang sudah lanjut usia, saya memperoleh cerita lisan mengenai sejarah Suku Akit. Dahulu, para leluhur mereka tinggal di pesisir Sungai Siak, wilayah Kerajaan Siak yang dirajai oleh Raja Sri Indrapura. Di daerah tersebut, mereka merasa terancam karena adanya gangguan dari binatang buas seperti gajah dan harimau. Lalu, mereka

meminta kepada sang raja supaya diijinkan pindah ke daerah baru. Sang raja mengizinkan dengan syarat, mereka harus mencari dan menyediakan banyak kayu yang diperlukan untuk pesta pernikahan putrinya. Syarat tersebut diterima oleh para leluhur, dan mereka pun mencari daerah hutan yang penuh dengan kayu-kayu. Akhirnya, mereka menemukan dan memasuki Pulau Rupert yang belum dihuni manusia. Mereka melakukan pekerjaan secara bergotong royong dengan membentuk tiga kelompok kerja, yakni: (1) Penebang kayu; (2) Pengangkut dan perakit kayu; (3) Peretas / pembersih sungai sebagai jalur kayu-kayu yang sudah dibentuk seperti rakit. Demikianlah syarat sang raja dapat dipenuhi oleh para leluhur mereka. Ketika sang raja mempertanyakan daerah mana yang mereka (para leluhur) pilih sebagai tempat tinggal baru, para leluhur memilih Pulau Rupert.

Setelah para leluhur berada di Pulau Rupert, mereka menetapkan kawasan tempat tinggal mereka sesuai dengan wilayah kerja dari setiap kelompok kerja di atas. Kelompok ketiga (peretas / pembuat jalur kayu yang sudah dirakit) tinggal di tepi pesisir pantai. Mereka ini dikenal sebagai Suku Hatas. Kelompok kedua (pengangkut dan perakit kayu) tinggal di daerah pedalaman (di atas Suku Hatas). Mereka dikenal sebagai Suku Akit. Dan, kelompok pertama (penebang kayu di

hutan) tinggal di daerah hutan (di atas Suku Akit). Mereka ini dikenal sebagai Suku Hutan.

Setiap suku dipimpin oleh seorang *Batin*, orang yang diakui mendapat karisma dari roh para leluhur. Seorang *Batin* menjadi pemersatu warga demi kesinambungan adat istiadat dan upacara keagamaan, yang diyakini berasal dari roh para leluhur. Jadi, sejak awal masyarakat pribumi ini sangat terikat pada adat istiadat dan upacara keagamaan mereka yang diadakan secara massal, seperti pernikahan, penyembuhan orang sakit, dan penguburan orang yang meninggal dunia. Jabatan *Batin* ini diturunkan kepada putra sang *Batin* setelah sang *Batin* meninggal dunia. Oleh karena seorang *Batin* sangat berpengaruh bagi warganya, maka pemerintah menetapkan seorang *Batin* sebagai kepala desa. Misalnya, Kepala Desa Hutan Panjang, sekitar tahun 1990-an, adalah seorang *Batin*. *Batin* juga dibantu oleh beberapa *bomo* (dukun) dalam acara penyembuhan orang sakit dan penguburan orang yang meninggal dunia.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pribumi menyebut diri mereka sebagai Suku Akit. Masyarakat pendatang pun mengenal masyarakat pribumi ini demikian. Namun, di balik sebutan tersebut, ada pergumulan hidup manusia yang sangat memprihatinkan, yakni punahnya eksistensi komunitas Suku

Hutan dan Suku Hatas di Pulau Rupa dan juga dari sejarah dunia. Eksistensi masyarakat pribumi ini sangat berkaitan erat dengan kepemilikan tanah. Dan kemampuan mereka untuk tetap memiliki kawasan tempat tinggal mereka sangat berkaitan erat dengan kemampuan mereka bertahan hidup terhadap ancaman kemiskinan.

Bagi masyarakat pribumi ini, tanah mempunyai nilai spiritual dan ekonomis. Tanah mempunyai nilai spiritual, karena tanah tempat tinggal setiap suku merupakan kawasan yang telah dipilih dan diwariskan oleh para leluhur sendiri kepada mereka. Di kemudian hari, warga dari setiap suku secara bergotong royong memperluas lahan kawasan mereka yang diperuntukkan bagi anak cucu mereka. Meskipun para leluhur telah meninggal dunia, tetapi mereka meyakini bahwa roh para leluhur itu tetap hidup bersama dengan mereka di kawasan tersebut. Itu sebabnya, mereka berusaha mempertahankan tanah warisan, karena dengan demikian hubungan mereka dengan roh-roh para leluhur dan orang tua yang telah meninggal dunia akan tetap terpelihara. Di samping nilai spiritual, tanah juga mempunyai nilai ekonomis, karena di atas tanah tersebutlah mereka menjalani kehidupan sehari-hari dan mencari nafkah.

Kepunahan eksistensi dua suku dari masyarakat pribumi ini, yakni Suku Hatas dan Suku Hutan, memperlihatkan ketidakmampuan mereka bertahan hidup masalah kemiskinan. Kawasan dari komunitas Suku Hutan yang jauh berada di dalam hutan menyebabkan warga dari komunitas ini dalam waktu yang sangat lama sulit bergaul dengan masyarakat di luar kawasan tersebut. Kesulitan demikian pun mengondisikan mereka hidup dalam kemiskinan yang terisolasi atau jauh dari perhatian pemerintah setempat. Akhirnya, sejumlah keluarga—berdasarkan informasi dari beberapa jemaat setempat—melakukan perpindahan keluar dari Pulau Rupa dan tinggal di daerah Bengkalis.

Beda halnya dengan warga komunitas Suku Hatas. Kawasan mereka disebut berada di Desa Titi Akar, mulai dari pesisir pantai hingga ke Dusun Hutan Ayu. Perubahan sosial sangat kentara di kawasan ini. Pada tahun 2006, ketika saya pertama kali hadir di Pulau Rupa melalui pelabuhan di Desa Titi Akar ini, saya mengamati kondisi sosial tersebut. Mulai dari pelabuhan hingga ke Dusun Hutan Ayu, dusun yang bersebelahan dengan Dusun Sungai Bantal (bagian dari Desa Hutan Panjang), mayoritas penduduknya adalah para etnis pendatang seperti Tionghoa, Melayu, Jawa, dan Batak. Sedangkan warga dari Suku Hatas menjadi minoritas. Di kawasan ini, warga dari

etnis Tionghoa menguasai kegiatan bisnis dan pertanian. Mereka memiliki toko atau kedai, klenteng, hotel, perkebunan kelapa sawit ribuan hektar dan beberapa *rumah burung walet* berupa bangunan bertingkat. Warga dari etnis Jawa, Melayu dan Batak bekerja sebagai polisi dan militer di pos polisi dan militer di pelabuhan, sebagai dokter dan perawat di Rumah Sakit dan Puskesmas, sebagai guru di beberapa sekolah, berjualan di pasar, sebagai petani di perkebunan karet dan kelapa sawit dimana masing-masing keluarga memiliki beberapa hektar di kawasan ini. Sedangkan warga dari Suku Hatas ini bekerja petani di perkebunan karet dan buruh di perkebunan kelapa sawit serta nelayan.

Dari tahun ke tahun, jumlah warga dari Suku Hatas di kawasan warisan leluhur mereka ini semakin berkurang. Mereka tidak mampu berkompetisi dengan warga pendatang. Secara ekonomi mereka miskin dan terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa mereka untuk menjual tanah warisan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tuntutan adat istiadat dan upacara keagamaan. Keputusan demikian justru semakin memiskinkan mereka. Kondisi mereka yang miskin justru menjadi keuntungan bagi warga pendatang, karena hanya warga pendatang yang sanggup membeli tanah yang ditawarkan. Di tahun 2007, misalnya,

harga 2 ha tanah nilainya Rp. 6 juta hingga Rp. 8 juta. Ketika aset tanah sudah habis, masing-masing keluarga mencari daerah di Pulau Rupa yang belum dimiliki manusia. Umumnya, mereka yang pindah ini tinggal di hutan yang jauh dari ruang publik. Adapun sejumlah keluarga dari Suku Hatas ini yang masih tinggal di Desa Titi Akar, bukanlah karena mereka lebih sanggup berkompetisi dan mampu bertahan hidup. Mereka juga hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak pindah karena seiring dengan perjalanan waktu, semakin sulit mencari daerah yang tidak dimiliki manusia.

Satu-satunya komunitas yang masih ada hingga hari ini adalah komunitas Suku Akit. Warga sisa dari kedua suku yang sudah punah bergabung dengan Suku Akit. Demikianlah masyarakat pribumi ini dikenal sebagai Suku Akit. Kawasan Suku Akit ini berada di Desa Hutan Panjang. Akses menuju desa ini dari pelabuhan relatif lebih mudah daripada kawasan Suku Hutan. Juga, perubahan sosial belum kentara seperti di Desa Titi Akar. Tetapi, kondisi hidup mereka setiap hari memperlihatkan kemiskinan yang memprihatinkan. Kondisi yang demikian semakin kentara dengan adanya usaha percepatan pembangunan Pulau Rupa.

1.2 Konteks Kemiskinan yang Parah

Berkaitan dengan kenyataan hidup masyarakat Suku Akit di Pulau Rupa, saya

berkesimpulan, bahwa mereka hidup di dalam kemiskinan yang parah. Pieris² menegaskan, bahwa selain konteks kemajemukan agama-agama, satu lagi konteks besar di Asia dimana gereja-gereja Kristen berada adalah kemiskinan yang parah. Menurutnya, kemiskinan yang parah menunjuk pada kenyataan banyaknya orang miskin sebagai akibat dari “kemiskinan yang dipaksakan”.

Di dalam uraian Pieris tersebut, ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yakni (a) kenyataan banyaknya orang miskin; (b) kemiskinan yang dipaksakan, yang berarti bahwa ada penyebab besar di luar diri orang miskin itu sendiri yang memaksa mereka menjadi miskin, yaitu struktur politik, ekonomi dan sosial yang tidak adil.

(a) Kenyataan Banyaknya Orang Miskin

Berapa banyak jumlah penduduk masyarakat Suku Akit di Pulau Rupa? Berapa banyak dari antara mereka yang miskin? Sejujurnya, belum ada data statistik dari pemerintah khusus mengenai masyarakat Suku Akit. Mereka diperhitungkan sebagai bagian dari keseluruhan penduduk di Pulau Rupa. Data statistik kependudukan yang dapat ditemukan adalah data pada tahun 2007 mengenai penduduk yang tinggal di Pulau Rupa.³ (*lihat tabel 1*)

Data statistik mengenai kemiskinan masyarakat *Suku Akit* pun disatukan

dengan kemiskinan seluruh masyarakat yang tinggal di desa dan kota dari wilayah Provinsi Riau. Kenyataan kemiskinan versi pemerintah di wilayah Prov. Riau disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Abdul Manaf, sebagai berikut:⁴ (*lihat tabel 2*)

Berkaitan dengan kedua data di atas, tanggapan saya adalah sebagai berikut:

- 1) Data-data tersebut tidak akurat dan tidak mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya. Data statistik mengenai kemiskinan di atas memperlihatkan bahwa kemiskinan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pembuatan data-data itu sarat dengan usaha pencitraan diri atau pretasi pemerintah. Data-data mengenai kemiskinan dipolitisasi.
- 2) Data statistik mengenai kependudukan didasarkan pada kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat Suku Akit banyak yang tidak memiliki KTP. Itu berarti selama tidak memiliki KTP, sesungguhnya mereka tidak dihitung sebagai warga Indonesia dan kemiskinan mereka pun diabaikan. Hal ini terungkap pada saat pembagian Beras Miskin (*raskin*) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebenarnya merupakan hak warga miskin. Tetapi, banyak masyarakat Suku Akit yang miskin tidak mendapatkan hak mereka karena tidak memiliki KTP.

- 3) Tentu saja masyarakat miskin yang belum memiliki KTP ini ingin sekali memiliki KTP. Memang pemerintah mengatakan bahwa KTP itu gratis, tetapi tidak demikian di Pulau Rupert. Pembuatan KTP hanya dapat diproses oleh aparat pemerintah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten jika setiap keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Proses pembuatan KK dan KTP di pulau ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sementara KK setiap tahun selalu berganti warna dan modelnya. Nampaknya, pembuatan KK dan KTP ini telah menjadi “mesin penghasil uang” bagi aparat pemerintah. Setidaknya, biaya yang harus dikeluarkan setiap orang yang ingin memiliki KTP adalah Rp.200.000,-. Di samping penggunaan KTP ini hanya sekitar Pulau Rupert saja, masyarakat Suku Akit yang miskin ini tidak bersedia mengurus KK dan KTP disebabkan biaya yang sangat mahal dan birokrasi yang bertele-tele.
- 4) Data statistik mengenai kependudukan dan kemiskinan itu tidak akurat karena banyak dari warga Suku Akit yang tinggal terisolasi atau jauh dari ruang-ruang publik (jalan umum, rumah sakit, sekolah, pasar, kantor desa). Mayoritas mereka tidak didata sebagai penduduk resmi.

Secara kuantitatif, data-data di atas dari pemerintah tidak bisa mengungkapkan kondisi riil fenomena kemiskinan yang dialami masyarakat *Suku Akit*. Oleh karena itu, secara kualitatif saya mencoba untuk mendeskripsikan hasil pengamatan saya selama 4 tahun mengenai fenomena kemiskinan yang parah yang dialami oleh masyarakat Suku Akit. Untuk mendeskripsikannya, saya memakai teori Robert Chambers, “Rural Development: Putting the Last First” (1983), yang telah dikutip dan dikembangkan oleh Myers. Robert Chambers menegaskan, bahwa kaum miskin hidup sebagai kelompok yang tidak beruntung. Lalu, Robert Chambers membuat dan menyebutkan 5 elemen “*poverty trap*” (perangkap kemiskinan) yang dialami rumah tangga (lihat poin 1-5). Selanjutnya, Myers menambahkan satu elemen lain yakni *spiritual poverty*.⁵

Myers menambahkan, bahwa setiap elemen di dalam sistem “*poverty trap*” tersebut saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Jika satu elemen bermasalah maka elemen-elemen lainnya juga bermasalah yang menghasilkan kemiskinan.⁶

Fenomena kemiskinan yang parah masyarakat Suku Akit adalah sebagai berikut:

- (a) *Material poverty*: Mereka rentan tersingkir karena tidak mampu

bertahan hidup terhadap desakan pembangunan Pulau Rupert sebagai zona pertumbuhan ekonomi. Mereka menjual tanah untuk mengatasi kemiskinan mereka, misalnya supaya ada biaya untuk mengobati keluarga yang sakit, menikahkan anak, atau mengadakan adat istiadat penguburan orang tua yang meninggal dunia. Tetapi, pilihan itu justru semakin memiskinkan mereka. Kemiskinan telah menyebabkan warga dari komunitas Suku Hutan dan Suku Hatas memutuskan untuk meninggalkan tanah warisan leluhur dan pindah di daerah yang belum dimiliki manusia. Keputusan untuk pindah di daerah baru belakangan ini tidak lagi memungkinkan bagi masyarakat miskin yang sudah tidak memiliki tanah, karena hampir seluruh tanah daratan telah dimiliki oleh manusia di Pulau Rupert. Rumah mereka umumnya adalah rumah kayu yang berukuran rata-rata 6 M x 6 M, atap daun rumbia dan dihuni banyak orang (sekitar 6-8 orang). Mereka mengonsumsi air hujan yang ditampung. Sedangkan di musim kemarau, mereka mengonsumsi air sumur yang sebenarnya tidak layak diminum. Sanitasi rumah tangga buruk. Hampir setiap keluarga memiliki utang di 2 atau 3 kedai / toko untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.

Selain tidak cukup melunasi utang, penghasilan dari jerih payah mereka bekerja ternyata juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tiap hari, membiayai kesehatan, membiayai pendidikan putra-putri mereka, dan juga membiayai pelaksanaan adat istiadat mereka.

- (b) *Physical weakness*: Mereka rentan menderita penyakit yang parah, karena tenaga mereka yang terkuras saat bekerja tidak diimbangi dengan asupan gizi yang cukup. Anggota keluarga yang sakit tidak dibawa berobat, karena mereka tidak mempunyai uang yang cukup. Dalam mengupayakan kesembuhan, biasanya mereka selalu mendahulukan ritual penyembuhan yang dipimpin oleh *bomo* (dukun). Tuan rumah harus menyediakan dana yang relatif banyak untuk membayar jasa sang *bomo* dan menyediakan makanan-minuman bagi semua tamu yang hadir dan tinggal di rumah tuan rumah selama beberapa hari. Jika sang *bomo* gagal, maka orang yang sakit itu dibawa berobat kepada perawat / dokter. Tentu saja kondisi orang yang sakit semakin parah, bahkan tidak jarang sejumlah orang sakit akhirnya meninggal dunia. Umumnya, orang tua yang sudah berusia 50 tahun sudah sakit-sakitan dan menjadi tanggungan

anggota keluarga yang masih mampu bekerja.

- (c) *Isolation*: Umumnya, pemukiman mereka jauh dari jalan umum, mereka tinggal dekat pada atau dalam hutan, tempat tinggal mereka jauh dari akses terhadap pasar, sekolah, kantor kepala desa, rumah sakit atau balai pengobatan. Tidak banyak dari mereka memakai listrik, karena jauh dari lokasi pembangkit listrik. Umumnya, mereka memakai lampu dinding, karena tidak mampu membiayai pemakaian ginset. Keluarga yang mempunyai ginset pun hanya memakainya selama 3-4 jam di malam hari. Masih banyak badan jalan umum di pemukiman mereka belum diaspal sehingga selama musim hujan jalan penuh dengan lumpur dan di musim kemarau penuh dengan abu. Kondisi jalan rusak menyebabkan beberapa keluarga yang mempunyai lahan kelapa sawit atau karet, terpaksa mengeluarkan biaya pengangkutan yang besar sehingga penghasilan mereka tetap tidak cukup membayar utang di kedai / toko.
- (d) *Vulnerability*: Mereka tidak memiliki tabungan, karena hasil kerja mereka dipergunakan untuk mencicil pembayaran utang. Mereka rentan sekali untuk menjadi miskin, karena keadaan yang memaksa mereka harus mengeluarkan uang yang banyak. Adat

istiadat dan upacara keagamaan sangat berarti bagi mereka. Untuk melaksanakan keduanya, mereka terpaksa menjual tanah, bahkan juga berutang. Tuan rumah yang mengadakan adat istiadat dan upacara keagamaan, misalnya penguburan orang tua yang meninggal dunia, harus menyediakan dana yang cukup banyak, karena banyak tamu yang harus diberi makan dan minum. Para tamu yang datang pun tinggal bersama dengan tuan rumah selama 2 hari 2 malam. Itu berarti para tamu itu pun tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Kondisi tersebut menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka minimal sekolah dasar. Akibatnya, banyak anak-anak dan pemuda/i mereka tidak memiliki pendidikan yang memenuhi syarat sebagai pegawai negeri maupun pekerja di perusahaan-perusahaan yang akan berdiri di pulau ini.

- (e) *Powerlessness*: Mereka tidak berdaya untuk menolak undang-undang yang melarang pembalakan. Kegiatan pembalakan merupakan sumber nafkah yang banyak dilakukan kaum laki-laki dewasa dari masyarakat Suku Akit. Pemerintah memberlakukan undang-undang tanpa mencari solusi yang baik bagi masyarakat Suku Akit yang menjadi korban. Sementara, mereka

sendiri menyaksikan beberapa pemilik modal dibiarkan oleh aparat pemerintah dan kepolisian melakukan pembalakan liar. Mereka selalu menjadi pihak yang dirugikan dan diabaikan oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dll, di atas tanah mereka tidak pernah diberikan ganti rugi. Tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Mereka tidak berdaya untuk menolak hadirnya PT. RAPP, yakni perusahaan pembuat kertas yang menguasai puluhan ribu hektar lahan untuk penanaman pohon bahan baku kertas di dekat kawasan pemukiman mereka. Penguasaan lahan yang direstui pemerintah itu telah membatasi perluasan lahan pemukiman dan perkebunan warga Suku Akit. Mereka rentan tertipu oleh beberapa pemilik modal yang menjanjikan akan memberikan hasil pengolahan lahan-lahan yang dipinjamkan mereka kepada pemilik modal. Hasil yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Malahan lahan-lahan mereka dirampas oleh pemilik modal yang didukung oleh pemerintah mulai dari desa hingga kabupaten. Masyarakat Suku Akit tidak berdaya untuk menuntut para pemilik modal yang curang itu. Aspirasi mereka dalam rapat pertemuan di tingkat desa kurang ditanggapi. Aparat pemerintah desa hingga kabupaten yang mayoritas

bukan *Suku Akit* lebih memprioritaskan kemajuan etnis mereka masing-masing.

(f) *Spiritual poverty*: Meskipun mereka telah menjadi warga dari agama Kristen atau Budha, mereka tetap melakukan upacara keagamaan tradisional mereka. Di dalam setiap pelaksanaan adat istiadat pun tetap diadakan ritual penyembahan kepada roh-roh para leluhur. Ketaatan melakukan adat istiadat dan upacara keagamaan merupakan ekspresi relasi mereka dengan para leluhur. Mereka berharap roh-roh para leluhur dan juga roh dari orang tua yang meninggal dunia menjaga dan memberkahi mereka dengan banyak rejeki. Sehubungan dengan itu pula, fenomena kerasukan dipahami sebagai kedekatan roh-roh leluhur pada seseorang. Orang yang dirasuki itu telah dipilih roh-roh para leluhur menjadi *bomo* (dukun) yang membantu penyembuhan orang sakit. Kemiskinan yang mereka alami menyebabkan mereka merasa minder, kecil, lemah, tidak berharga. Interaksi dengan etnis lain pun terbatas. Mereka cenderung curiga dan menjaga jarak terhadap etnis lain, apalagi pendatang baru.

(b) Kemiskinan yang Dipaksakan

Mengapa warga Suku Akit miskin? Menurut saya, ada dua faktor penyebab kemiskinan mereka:

- (i) *Faktor internal*, yakni dari diri mereka sendiri. Jika ditelusuri pada sejarah keberadaan mereka di Pulau Rupa, dapat dikatakan, bahwa masyarakat Suku Akit itu adalah penduduk yang pindah dari pesisir Sungai Siak. Mereka hidup secara komunal yang dipimpin oleh seorang *Batin*. Kegiatan kerja didasarkan pada petunjuk sang *Batin* dan *bomo* (dukun). Sebelum mereka beralih ke pertanian (mengalihfungsikan tanah jadi lahan perkebunan karet dan kelapa sawit), penghasilan utama mereka adalah membalak kayu di dalam hutan. Kaum laki-laki yang dipandang mampu bekerja umumnya melakukan pekerjaan ini. Setelah mereka membalak di dalam hutan selama 2 minggu dan kayu-kayu yang mereka hasilkan dijual kepada *toke* (pemilik modal yang selanjutnya menjual kayu-kayu itu ke Malaysia dan Singapura), mereka kembali ke kampung untuk beristirahat. Dalam waktu yang relatif singkat, penghasilan dari kegiatan pembalakan ini cukup membayar utang di kedai, membeli kebutuhan hidup setiap hari, dan berfoya-foya seperti minum minuman keras.

Ketika penghasilan sudah habis, maka mereka kembali ke dalam hutan untuk membalak. Jadi, hidup sangat santai dan tidak berorientasi ke masa depan. Mereka tidak menabung dan tidak berminat mendukung pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan tidak menjamin mereka beroleh penghasilan besar seperti pekerjaan membalak di dalam hutan. Itu sebabnya, UU anti *illegal logging* merupakan ancaman dari mereka. Meskipun demikian, mereka tidak langsung menaati UU tersebut. Beberapa orang dari mereka melakukan pembalakan dan mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi. Secara terpaksa, mereka mencoba mengolah tanah-tanah warisan leluhur yang sudah lama menjadi lahan “tidur”. Mereka membuat ladang padi, perkebunan karet dan kelapa sawit. Tetapi, semua lahan tersebut kurang dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Di samping itu, adat istiadat dan upacara keagamaan menuntut mereka harus mengeluarkan banyak uang. Dan, para tamu yang datang pada pesta pernikahan, ritual penyembuhan dan upacara pemberangkatan orang yang

meninggal dunia, pun tidak bekerja di ladang mereka. Kebiasaan-kebiasaan demikian turut memiskinkan mereka.

(ii) *Faktor eksternal*, yakni struktur-struktur politik, ekonomi dan sosial di luar diri warga Suku Akit sendiri. Struktur-struktur tersebut berpotensi membuat mereka ketergantungan dan tidak berdaya. Berkaitan dengan kondisi ini, Banawiratma dan Muller menyatakan:⁷

“...paling berat dalam semua kemiskinan yaitu pengalaman *ketidakberdayaan dan ketergantungan*. Orang miskin hidup bagaikan penjara dengan tembok tinggi yang tak bisa dilampau, bahkan melihat ke luar pun tidak mungkin. Mereka hidup dalam keadaan terbelenggu hampir tanpa harapan. Mereka tak ada pengalaman selain kemiskinan. Mereka tak punya pendidikan yang bisa membuka mata, mereka tak punya kuasa dan koneksi, mereka tak punya modal. Dan kalau mereka berusaha maju, maka hampir pasti akan terkena macam-macam halangan dan rintangan”.

Struktur politik, misalnya, dimana pemerintah memberlakukan UU anti pembalakan liar telah menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat Suku Akit di Pulau Rupa. Pemerintah yang notabene bermaksud mencegah kerusakan hutan, tidak peduli bahwa keputusannya mengorbankan

masyarakat Suku Akit. Ironisnya, sejumlah pemilik modal melakukan pembalakan hutan ternyata didukung oleh aparat pemerintah, aparat kepolisian dan militer. Dapat dikatakan, bahwa UU tersebut hanya berlaku kepada masyarakat lemah, tetapi tidak bagi para pemilik modal. Struktur ekonomi, bahwa meskipun Suku Akit adalah masyarakat pribumi di Pulau Rupa, tetapi seluruh kegiatan perdagangan dikuasai oleh warga pendatang (seperti China, Jawa, Melayu, Nias). Merekalah yang menentukan harga. Mereka tidak peduli apakah masyarakat Suku Akit memiliki kemampuan daya beli atau tidak. Nyatanya, hampir semua keluarga Suku Akit memiliki utang di beberapa kedai / toko. Mereka membayar utang dengan hasil perkebunan mereka seperti karet dan kelapa sawit. Harga pun ditentukan oleh pemilik kedai / toko dengan sewenang-wenang. Akibatnya, mereka tetap berada dalam perangkap utang. Struktur sosial, ada *gap* yang lebar antara masyarakat Suku Akit dengan warga pendatang. Secara ekonomi warga pendatang lebih mapan daripada masyarakat Suku Akit. Mayoritas aparat pemerintah desa pun adalah warga

pendatang. Dengan demikian, pergumulan hidup masyarakat Suku Akit kurang seringkali diabaikan karena aparat pemerintahan desa lebih memprioritaskan pembangunan di daerah pemukiman mereka. Itu sebabnya, dusun-dusun yang dihuni warga pendatang jauh lebih maju dibandingkan dusun-dusun yang dihuni mayoritas masyarakat Suku Akit. Terlebih lagi, pembangunan percepatan Pulau Rupat sebagai zona pertumbuhan ekonomi semakin memperlihatkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara warga pendatang dan masyarakat Suku Akit. Masyarakat Suku Akit yang lemah justru semakin lemah dan rentan terpinggirkan, sementara para warga pendatang lebih siap menghadapi perubahan di Pulau Rupat.

2. Fenomena Pembangunan Pulau Rupat sebagai Zona Pertumbuhan Ekonomi

Rencana pemerintah untuk membuat Pulau Rupat sebagai zona pertumbuhan ekonomi, sebenarnya telah lama dibuat. Tetapi, realisasi dari rencana itu semakin gencar pada 10 tahun belakangan ini. Ada beberapa alasan pembangunan Pulau Rupat:

- (a) Pulau Rupat merupakan pulau terluar Indonesia yang berhadapan dengan Selat Malaka. Pulau terluar ini perlu dibangun dalam rangka pertahanan Indonesia.
- (b) Pulau Rupat berada di persilangan antara Malaysia dengan Singapura. Posisi strategis ini sangat potensial menjadikan Pulau Rupat sebagai daerah pertumbuhan ekonomi.
- (c) Pulau Rupat menjadi satu-satunya pulau yang dapat dikembangkan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, seperti Pulau Batam (bagian dari Provinsi Kepulauan Riau).
- (d) Pulau Rupat mempunyai pantai putih sepanjang 17 KM yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas perdagangan internasional. Oleh karena itu, Pulau Rupat sangat potensi menjadi daerah pariwisata.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah (tingkat pusat dan daerah) untuk membangun Pulau Rupat sebagai zona pertumbuhan ekonomi, adalah:

- (a) Pemerintah memberlakukan UU anti-pembalakan liar. Undang-undang ini ternyata hanya berlaku bagi masyarakat lemah seperti masyarakat Suku Akit agar tidak melakukan pembalakan di hutan. Nyatanya, banyak hutan yang

dahulu adalah lahan “tidur” telah dikuasai oleh para investor. Jadi, undang-undang ini, nampaknya, hendak memperuntukkan hutan untuk kepentingan para investor.

(b) Program transmigrasi. Pada tanggal 25 Juni 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eman Suparno, telah mencanangkan Program transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM). Program ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga miskin yang ada di Bengkalis dan Riau secara umum serta keluarga yang didatangkan dari Pulau Jawa. KTM tersebut meliputi 5 desa di Pulau Rupat yang secara umum dihuni oleh masyarakat Suku Akit. Itu berarti lahan-lahan “tidur” di kawasan masyarakat Suku Akit akan dikelola oleh keluarga peserta program transmigrasi. Program transmigrasi KTM juga akan diikuti dengan pembangunan pabrik gula lengkap dengan perkebunan tebunya. Lahan yang disediakan untuk program transmigrasi itu adalah seluas 2.300 hektar.⁸

(c) Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan membangun jembatan yang menghubungkan Malaka-Pulau Rupat-Dumai. Jembatan ini

dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

3. Korelasi di Antara Kedua Fenomena

Ada 2 fenomena yang sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, fenomena kemiskinan yang parah sebagai pergumulan hidup masyarakat Suku Akit di Pulau Rupat. Kemiskinan tersebut harus direduksi dan diatasi. Kedua, fenomena percepatan pembangunan Pulau Rupat sebagai zona pertumbuhan ekonomi. Sejatinya, pembangunan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mereduksi atau mengatasi kemiskinan masyarakat Suku Akit. Oleh karena itu, patut dipertanyakan: apakah pemerintah sungguh-sungguh memiliki niat memaksudkan pembangunan tersebut untuk pembebasan atau pemerdekaan masyarakat Suku Akit dari penjara kemiskinan? Nyatanya, secara historis, pemerintah tidak sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat Suku Akit yang lemah dan miskin ini. Pemerintah mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang lebih siap ikut serta di dalam perubahan di Pulau Rupat, yakni warga pendatang dan para investor. Selain memperlihatkan kemiskinan yang parah dari masyarakat Suku Akit, percepatan pembangunan tersebut juga semakin memperlihatkan kesenjangan ekonomi dan

sosial antara warga pendatang dan masyarakat Suku Akit. Saya sendiri mendengarkan keluhan dari warga Suku Akit betapa mereka sangat apatis dan pesimis memandang masa depan mereka sebagai individu, keluarga dan komunitas di Pulau Rupert.

Siapa yang diuntungkan dari pembangunan tersebut? Saya mengamati, bahwa masyarakat pendatang dan para investor sangat menikmati percepatan pembangunan itu. Mereka memiliki sejumlah kesiapan untuk berkompetisi pada perubahan situasi menuju Pulau Rupert sebagai zona pertumbuhan ekonomi. Mereka memiliki modal yang cukup untuk membeli tanah-tanah masyarakat Suku Akit. Di samping itu, mereka juga telah memiliki penghasilan, kegiatan bisnis dan keterampilan. Malah, semakin banyak orang dari luar Pulau Rupert berusaha untuk berinvestasi di Pulau Rupert ini. Tetapi, masyarakat Suku Akit justru melihat pembangunan itu sebagai ancaman bagi mereka. Setiap keluarga Suku Akit sudah kehilangan aset tanah. Adapun tanah yang masih ada, mereka pakai sebagai tempat tinggal putra-putri mereka yang berkeluarga. Mereka tidak mempunyai penghasilan, kegiatan bisnis dan keterampilan yang mapan. Jadi, pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat ramah terhadap pemilik modal,

tetapi sangat sangar terhadap masyarakat Suku Akit yang miskin.

4. Teologi Ekonomi yang Kontekstual di Pulau Rupert

Kondisi pergumulan hidup di atas menuntut gereja harus memiliki teologi ekonomi yang kontekstual. HKBP sendiri sebagai gereja yang melakukan pelayanan Zending sejak April 1969 di Pulau Rupert belum memiliki teologi ekonomi yang kontekstual. Sebenarnya, selain pelayanan gerejawi, HKBP juga melakukan pelayanan di bidang pendidikan sekolah dasar dan kesehatan. Ketiga jenis pelayanan tersebut menjadi rutinitas yang sama sekali tidak menolong masyarakat Suku Akit keluar dari kemiskinan yang parah.

Eka Darmaputera, melalui makalahnya yang berjudul “Gereja Mencari Jalan Baru Kehadirannya: Melawan Konflik Diri, Menghadapi Tekanan Eksternal”, pada Seminar Agama-agama Balitbang PGI di Magelang, September 1998, mengatakan:

Bila kesekitaran kita telah begitu berubah, akan tetapi gereja-gereja kita tidak berubah, alias tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan tersebut, ini artinya adalah selama ini tidak terjadi interaksi yang signifikan antara gereja dan lingkungan kesekitarannya...ketiadaan interaksi yang signifikan ini hanya bisa diartikan satu saja: gereja-gereja kita sedang menuju kepada irrelevansi total! Padahal sesuatu yang tidak relevan, tidak mungkin berfungsi.

Dan sesuatu yang tidak berfungsi?
Mati!⁹

Oleh karena itu, menurut Eka Darmaputera, gereja harus mencari paradigma baru yang memungkinkan gereja menghadirkan diri secara “pas” baik dalam menjawab tuntutan internal maupun eksternalnya, agar kehadirannya kembali menjadi signifikan, relevan, dan fungsional.¹⁰

Dengan demikian, ketika gereja lebih memfokuskan pelayanannya hanya pada pelayanan spiritual, pemenangan jiwa, pembaptisan, dan penambahan jumlah jemaat, sementara jemaatnya sendiri dan masyarakat sekitarnya mengalami pergumulan hidup yang memprihatinkan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka gereja demikian benar-benar tidak *relevan, signifikan dan fungsional*. Gereja demikian sudah mati. Sejatinya, pelayanan gereja di Pulau Rupa harus mentransformasi hidup masyarakat Suku Akit secara holistik.

Berkenaan dengan hal itu, saya mengajukan teologi yang kontekstual di Pulau Rupa sebagai berikut:

i) Mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan Firman Allah. Ketika umat Israel hidup di pembuangan Babelonia, Allah berfirman kepada mereka melalui Nabi Yeremia: “*Usahakanlah* kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan

berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (29:7). Israel sangat kaget karena: (a) Mereka harus “mengusahakan” *shalom* di negeri Babelonia, tempat mereka tinggal, karena *shalom* di kota itu pasti menjadi *shalom* mereka sendiri. Sebelum firman itu disampaikan Yeremia, mereka tidak berpikir tinggal lama di Babelonia, melainkan segera kembali ke Yerusalem. (b) Mereka harus “mendoakan” Negeri Babelonia. Padahal sebelumnya lazim bagi Israel hanya mendoakan *shalom* atas Yerusalem dan Israel (lih. Mzm. 122:8; 125:5; 128:6). Sedangkan terhadap umat di luar Israel, mereka akan berdoa dengan isak tangis supaya TUHAN membalaskan dendam mereka kepada musuh-musuh yang mengancam negeri mereka termasuk orang-orang Babelonia (Mzm. 137:7-8).¹¹

Berdoa dan mengusahakan kesejahteraan, itulah penekanan perintah Allah bagi umat Israel. Perintah demikian berlaku bagi HKBP di Pulau Rupa. Umat yang berdoa adalah juga umat yang pro aktif mengusahakan kesejahteraan jemaat dan masyarakat sekitarnya. Gereja harus memperlihatkan keberadaan sebagai perwujudan dari Allah yang maha hadir dan yang menghendaki pembebasan manusia dari penderitaan.

Dengan memperhatikan pergumulan hidup jemaat dan masyarakat sekitarnya, yakni Suku Akit, gereja dapat melakukan beberapa hal berikut:

- (a) Membangun komunitas basis yang mengorganisir potensi masyarakat Suku Akit. Selama ini gereja memposisikan masyarakat Suku Akit sebagai objek yang lemah dan miskin yang membutuhkan pelayanan. Mereka tidak dianggap sebagai subjek yang memiliki potensi. Komunitas basis ini tidak hanya mencakup jemaat, melainkan masyarakat Suku Akit. Komunitas ini dibangun melalui proses peyadaran agar mereka dengan gereja sama-sama berjuang. Tidak ada jaminan bahwa komunitas ini akan berhasil dalam waktu singkat. Oleh karena itu, gereja harus mampu bersabat dan kesetiaan untuk mendampingi komunitas ini. Komunitas ini dapat dibuat sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah. Misalnya, komunitas basis petani, peternak, nelayan, dll.
- (b) Memperjuangkan ada KK dan KTP gratis bagi masyarakat Suku Akit. Pemerintah sendiri menyatakan, KK dan KTP itu gratis. Tetapi aparat pemerintah di Pulau RUPat

telah menjadikan proses pembuatan KK dan KTP ini sebagai “mesin penghasil uang”. Untuk memangkas jalur korupsi demikian, masyarakat miskin dapat diorganisir untuk mengurus pembuatan KK dan KTP itu. Beban pembuatan KK dan KTP tidak diminta dari setiap orang, melainkan ditanggung bersama berupa biaya transportasi aparat desa bersama perwakilan masyarakat (boleh dari gereja) ke tingkat kecamatan. KTP ini sangat penting agar masyarakat Suku Akit yang miskin ini diakui sebagai warga negara dan kemiskinan mereka patut mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah hanya memperhitungkan jumlah orang miskin data statistik yakni orang miskin yang memiliki KTP.

- (c) Adanya kerjasama lintas gereja dan agama. Di tengah-tengah masyarakat Suku Akit, ada Gereja HKBP, GPdI, Katolik, Karismatik dan agama Budha. Kerjasama ini sangat penting dalam mereduksi kemiskinan. Para pemimpin gereja dan agama pun harus dibangun kesadarannya masing-masing, betapa mendesaknya untuk membela masyarakat Suku Akit yang lemah dan miskin ini di

hadapan pemerintah yang lebih berpihak kepada para investor.

- (d) Memperjuangkan keluarga-keluarga miskin benar-benar diprioritaskan dalam program transmigrasi di Pulau Rupa. Program tersebut dipastikan tidak menjadi proyek yang marak dengan praktek korupsi dan suap.
- (e) Melakukan pelatihan-pelatihan kerja yang sesuai dengan area pemukiman dan keinginan masyarakat Suku Akit. Semua ini dimaksudkan agar masyarakat miskin menjadi berdaya, memiliki kemampuan, kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus berubah. Masyarakat miskin harus memiliki lapangan pekerjaan agar mereka mempunyai penghasilan untuk melanjutkan kehidupan mereka.

ii) Paradigma Baru dalam Aktifitas Bisnis

Dewasa ini, para pelaku bisnis telah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi suatu saat akan berhenti jika aktifitas bisnis mengabaikan isu-isu sosial dan lingkungan. Oleh karena, itu seluruh kegiatan bisnis di Pulau Rupa harus didasarkan pada paradigma baru, yakni 3 P (*Planet, People, dan Profit*). Peter

Fisk¹² memberikan gambaran mengenai bagaimana perkembangan isu-isu sosial dan lingkungan telah menjadi perhatian utama para pelaku bisnis. (*lihat tabel 4*)

Menurut Peter Fisk, bahwa pelaku bisnis perlu memberikan perhatian terhadap tantangan-tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan secara holistik. Semua itu dapat dikombinasikan sebagai kekuatan-kekuatan yang berpotensi menciptakan sebuah dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dicatat, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terus berkelanjutan jika aktifitas-aktifitas bisnis terintegrasi dengan prioritas sosial dan lingkungan.¹³ Sehubungan dengan paradigma baru dalam kegiatan ekonomi dan bisnis demikian, para pemimpin gereja dan agama dengan pro aktif menyuarakan agar pemerintah dan para pemilik modal memperhatikan paradigma baru tersebut. Percepatan pembangunan Pulau Rupa sebagai zona pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan. Justru, dengan ada integrasi ekonomi dan bisnis dengan prioritas sosial dan lingkungan, semua pihak akan sama-sama diuntungkan.

iii) Masyarakat Sebagai Pelaku Aktif Dalam Kegiatan Bisnis

Selama ini, pembangunan dilakukan dengan pola *government driven*. Artinya, pembangunan hanya dijalankan oleh pemerintah. Rakyat dikondisikan “tidak berdaya” yang pada akhirnya rakyat menjadi manja, menang sendiri, dan tidak mau diajak bertanggung jawab. Hari ini pun kita sudah melihatnya. Desakan untuk mempunyai *the strong leader*, atau konsep “Ratu Adil” adalah konsep rakyat yang “tidak berdaya”, dan sekaligus memberitahu kita sebuah fenomena “rakyat yang tidak dewasa”. Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan seluruh rakyat di dalam pembangunan. Dengan demikian, pemerintah harus menjadikan pemberdayaan sebagai nilai dan pilihan kebijakan, sekaligus sebagai pembelajaran sosial, dalam arti kita selalu belajar bagaimana melakukan pemberdayaan yang semakin hari semakin baik. Karena, seperti kata cendekiawan Soedjatmoko, *pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin*. Dan, pembelajaran adalah bagian inti dari pembangunan pada zaman kini, dan, mungkin, sampai kurun waktu yang panjang di masa depan.¹⁴

D) Pertumbuhan Ekonomi yang Memberdayakan Masyarakat Miskin

Pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek-aspek kualitatif dari pembangunan itu sendiri, yakni kemiskinan, kesenjangan, dan *human resources development*.¹⁵ Jika selama ini dipakai konsep *trickle down effect*, maka seharusnya diterapkan konsep *growth with distribution*. Dalam konsep *trickle down effect*, pendapatan dicapai semata-mata dengan instrumen fiskal (pajak) dan pemberian santunan, tanpa terlalu mementingkan peran serta dan keterlibatan rakyat banyak sebagai pelaku ekonomi. Dalam kerangka konsep ini jumlah dan keberdayaan pelaku ekonomi dalam pasar tidak menjadi perhatian utama. Sementara dalam konsep *growth with distribution*, distribusi pendapatan dicapai selain dengan “mengendalikan” yang besar lewat kebijakan fiskal, juga “mengangkat” kelompok kecil dengan memberikan bekal dan ruang lebih besar kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam aktifitas ekonomi sehingga dapat menikmati pendapatannya secara langsung.¹⁶ Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menyediakan dana yang cukup untuk memberi santunan kepada masyarakat miskin. Tetapi, pertumbuhan ekonomi di Pulau Rupa menjadi modal pemberdayaan masyarakat miskin seperti masyarakat

Suku Akit. Keberdayaan mereka memungkinkan mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi demi kelanjutan hidup mereka. Dengan adanya pendapatan mereka yang semakin baik, maka hal itu juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemampuan daya beli mereka terhadap produk yang ditawarkan di pasar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Saya telah mencoba memperhatikan suatu fenomena yang kontras, yakni fenomena kemiskinan masyarakat Suku Akit dan percepatan pembangunan Pulau Rupert sebagai zona pertumbuhan ekonomi. Sejatinya, pembangunan tersebut berdampak baik pada kehidupan masyarakat Suku Akit. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan, bahwa pemerintah masih memperlakukan masyarakat miskin sebagai pelaku yang pasif dan tidak berdaya. Pemerintah lebih memprioritaskan para pemilik modal dengan memfasilitasi semua kepentingan mereka. Sedangkan, usaha pembedaan masyarakat miskin belum berlangsung.

Oleh karena itu, gereja (HKBP) seharusnya melihat kondisi-kondisi yang tidak ideal tersebut sebagai panggilan bagi gereja supaya bertindak secara konkrit di Pulau Rupert dalam rangka mereduksi hingga mengatasi persoalan kemanusiaan bersama dengan semua komunitas yang

memiliki tujuan yang sama. Mereka patut diberi perhatian dan gereja harus berpihak kepada yang miskin ini. Hal ini sesuai dengan khotbah perdana Yesus di sinagoge (Luk. 4:16-21), bahwa Yesus hadir dengan misi untuk mewujudkan pembebasan bagi orang-orang miskin. Sehubungan dengan itu, teologi ekonomi masih harus dikembangkan dalam *planning action* sehingga teori benar-benar menjadi nyata di dalam aksinya.

Saya sendiri memahami, bahwa percepatan pembangunan Pulau Rupert sebagai zona pertumbuhan ekonomi, merupakan sesuatu yang baik. Tetapi, hal yang sangat mendesak adalah mengupayakan pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka dapat ikutserta sebagai pelaku bisnis yang aktif, mandiri dan kreatif di Pulau Rupert. Dalam kondisi yang demikian, gereja hadir sebagai komunitas yang berkomitmen mengikut Yesus Kristus, yang di dalam komunitas itu sendiri terdapat orang-orang miskin, juga hadir sebagai sahabat yang solider, berpihak dan aktif mendampingi bagi orang-orang miskin, baik anggotanya maupun masyarakat miskin yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Banawiratma, J. B. dan Müller, J.
1993 *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan*

- Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius
- Sinaga, Martin L. dkk (peny.).
2005 *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-teks Terpilih Eka Darmaputera*, Jakarta: BPK-GM
- Davidson, Robert.
1985 *Jeremiah Volume 2 and Lamentations*, Kentucky: Westminster John Knox Press
- Fisk, Peter.
2010 *People, Planet, Profit: How to embrace sustainability for innovation and business growth*, Great Britain & USA: Kogan Page Limited
- Myers, Bryant L.
1999 *Walking With The Poor: Principles and Practices of Transformational Development*, Maryknoll, New York: Orbis Books
- Pieris, Aloysius.
1996 *Berteologi Dalam Konteks Asia*, Yogyakarta: Kanisius
- Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho.
2007 *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- <http://www.depnakertrans.go.id/PULAURUPAT.pdf> (diunduh: 14/12/2011)
- <http://www.semenanjung.com/news/> (diunduh: 14/12/2011)
- <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=24575> (diakses: 14/12/2011)

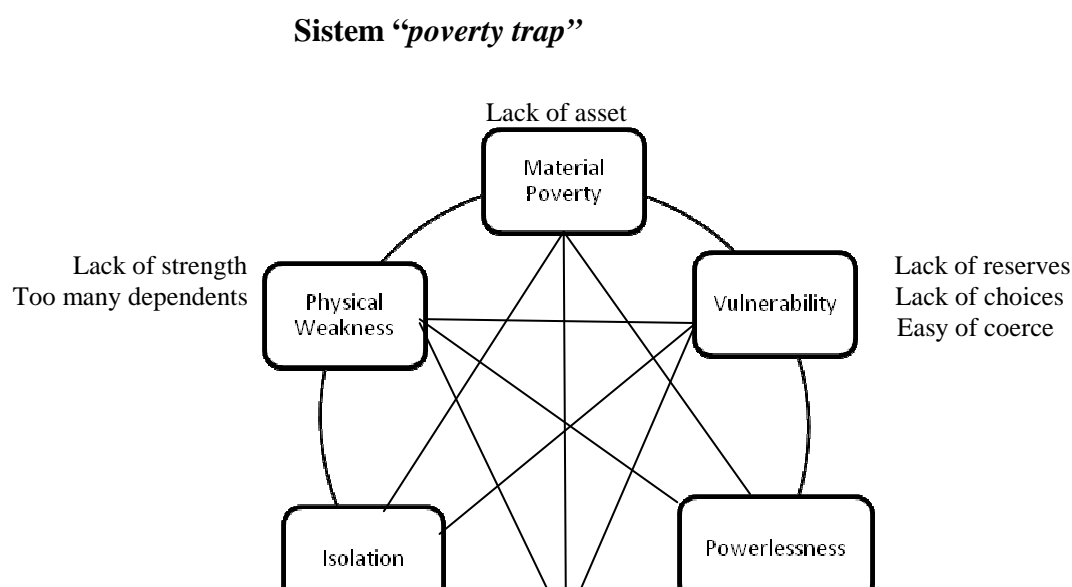
Tabel 1

Kecamatan	Luas (KM ²)	Desa / Kelurahan	KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
				Laki-laki	Perempuan	
Rupat	928,4	10	6.154	15.381	15.088	30.469
Rupat Utara	638,5	5	2.903	5.752	5.856	11.608
Total	1.566,9	15	9.057	21.133	20.944	42.077

Tabel 2

Tahun	Orang Miskin di desa	Orang Miskin di kota	Jumlah	Persentase
2006	338.600	226.300	564.900	11,85
2007	328.100	246.400	574.500	11,20
2008	321.600	245.100	566.670	10,63
2009	301.900	225.600	527.490	9,48
2010	291.340	208.920	500.260	8,65

Tabel/Skema 3



Lack of assets
Lack of education
Excluded from system

Lack of influence
Lack of social power
Exploited by powers

Broken relationships
With neighbour and God

Tabel 4

1950s-60s Awaking	1970s-80s Regulating	1990s-00s Contributing	2010+ Transforming
Industrial growth delivers wealth and expectation	Economic growth with increased consumerism and international trade	Multinational brands serve more diverse, informed and conscious customers	Global markets, with instant connectivity, global trends and rising 'base of the pyramid'
Western markets thrive whilst the East recovers more slowly	Product innovation supported by low-cost automated production	Digital innovation creates virtual businesses, faster and more connected	Sustainable innovation puts social and environment issues at core of business
Migration to cities accelerated by travel and employment	Improved lifestyle, human and equal rights lead to new practices	Corporate governance improves the ethical and social behavior of business	Collaborative organizations and networked communities for new business models
Flower-power hippies raise social and environment priorities	Government regulation on pollution and waste through taxation	Recycling, sustainable sourcing and disposal adopted as standard	Sustainable markets are most profitable, as 'doing good' becomes the best way to grow

¹ Pulau Rupa adalah bagian dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di pulau ini ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Rupa Utara dan Kecamatan Rupa.

² Pieris (1996, h. 47-49)

³ <http://www.depnakertrans.go.id/PULAUROPAT.pdf> (diunduh: 14/12/2011)

⁴ <http://www.semenanjung.com/news/> (diunduh: 14/12/2011)

⁵ Myers (1999, h. 66-67)

⁶ Myers (1999, h. 68)

⁷ Banawiratma (1993, h. 128-129)

⁸ <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=24575> (diakses:14/12/2011)

⁹ Eka Darmaputera, "Jalan Baru Kehadiran Gereja", dalam Sinaga (2005, h. 470)

¹⁰ Sinaga (2005, h. 472)

¹¹ Davidson (1985, h. 63-65)

¹² Fisk (2010, h.5)

¹³ Fisk (2010, h.7-8)

¹⁴ Dwidjowijoto (2007, h. 10-11)

¹⁵ Dwidjowijoto (2007, h. 47)

¹⁶ Dwidjowijoto (2007, h. 47)